PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN, ASIMETRI INFORMASI, EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KEADILAN DISTRIBUTIF TERHADAP KECURANGAN (*fraud)*

(Studi Empiris Pada OPD Kota Dumai)

Oleh :
Dhevy Melati
Pembimbing: Taufeni Taufik dan Volta Diyanto

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : dhevy.melati@gmail.com

The Influence Of Good Governance, Information Asymmetry, Effectiveness Of Internal Control And Distributive Justice To Fraud (Empirical Study On OPD Dumai City)

ABSTRACT

This study examines the impact of good governance, information asymmetry, the effectiveness of internal control and distributive justice against fraud. The population in this research is Dumai City Device Organization of 34 OPD. Of the existing population then obtained samples in this study as many as 102 respondents. Sampling technique using purposive sampling method, The technical analysis used in this study is multiple linear regression. While data processing method used by SPSS 21.0 as software to process data. The results showed that good governance effect on fraud (fraud) with a significant value of 0.000. information asymmetry has a significant effect of 0.009 on fraud. the effectiveness of internal control has a significant effect of 0.000 against fraud. And distributive justice has a significant effect of 0.000 on the fraud.

Keywords : Good Governance, Information Asymmetry, Internal Control, Distributive Justice and Fraud.

PENDAHULUAN

Instansi pemerintah mampunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan suatu pemerintah. Terkait dengan pencapai tujuan pemerintah tersebut, maka harus didukung dengan perilaku atau tindakan baik dari para pemimpin dan para pegawainya. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadinya kecurangan yang terjadi dikalangan instansi pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah.

Pada hakekatnya, kecurangan *(fraud)* adalah benalu sosial yang merusak struktur pemerintah, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemeritahan dan pembangunan pada umumnya. Namun, akses perbuatan kecurangan merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengatakan bahwa kecurangan adalah

satu jenis tindakan melawan hukum yang disengaja unutk mendapatkan sesuatu dengan cara menipu, sedangkan menurut *Arens et al* (2011:371), kecurangan adalah setiap ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang atau pihak lain.

Cressey (1953) mengemukakan bahwa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kecurangan (fraud) ada tiga yaitu rasionalisasi *(rationalization),* tekanan (*pressure),* dan kesempatan *(opportunity).* Ketiga faktor tersebut sering disebut *fraud triangle,* yang datang bersamaan akan memperbesar peluang terjadinya *fraud.*

Jenis kecurangan (*fraud)* yang sering terjadi pada sektor pemerintahan adalah korupsi. Hampir setiap hari media massa selalu memberitakan tentang korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio–Corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok.

Negara Indonesia dengan kondisi ekonomi yang belum stabil dan masih merupakan negara berkembang juga terkena kasus skandal korupsi, pada tahun 2017, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi yang dimana untuk hasil CPI (Corruption *Perceptions Index*), TI (*Transparency International*) menempatkan Indonesia peringkat ke 96 dari 176 negara yang menjadi sasaran survei. Indeks persepsi korupsi Indonesia dari 2016 ke 2017 sama, yaitu dengan nilai 37, tapi peringkatnya turun. Pada 2016, Indonesia berada di peringkat ke-90.

Berdasarkan data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada 576 kasus korupsi sepanjang tahun 2017. Angka ini bertambah dibandingkan pada tahun 2016 dengan total 482 kasus, dengan kerugian negara Rp 6,5 triliun dan nilai suap Rp 211 miliar. Penyebabnya karena ada pengusutan terhadap kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 2,3 Triliun.

Sebagai contoh kasus yang dikutip dari *http//dumai.go.id* pada tahun 2017, Kejaksaan Negeri Kota Dumai menemukan adanya kasus penyelewengan dana tanggap darurat kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai pada tahun anggaran 2014. Jaksa penyidik belum mengetahui potensi kerugian negara, karena perkara ini masih dalam proses penyelidikan penghitungan kehilangan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perkara ini berawal dari laporan kegiatan pembelanjaan masker, makanan dan minuman serta honor sebesar Rp750 juta, namun saat dicek ternyata anggaran belanja tidak sesuai. Saat ini sudah ditetapkan tiga tersangka yaitu kepala pelaksana BPBD, pejabat kepala seksi dan bendahara pengeluaran BPBD Dumai.

Selanjutnya dari kasus yang ditangani dari tahun 2016-2017 banyak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalan perkara kasus tindak pidana korupsi di Kota Dumai. Seperti perkara tindak pidana korupsi dalam mata anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggarkan melalui Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dumai tahun 2015, dana tersebut yang mencapai Rp 26,8 miliar itu tidak terealisasi secara maksimal.

Kasus lainnya yaitu telah ditetapkan terdakwa atas kasus dugaan korupsi pengadaan koran di Sekretariat DPRD di Kota Dumai, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana belanja surat kabar di DPRD Dumai yang terjadi dalam anggaran belanja tahun 2009-2013, yang diduga merugikan negara mencapai Rp 619 juta. Dana yang dianggarkan tersebut meliputi pengadaan surat kabar dan pengumuman penyediaan langganan surat kabar pada Setwan Dumai.

sejumlah media surat kabar yang berlangganan adalah sebanyak 16 media cetak terbitan harian dan 39 media cetak terbitan mingguan.

Berdasarkan fenomena tersebut, hal ini menjadi menarik untuk diteliti. Upaya yang dilakukan untuk dapat meminimalisirkan kecurangan dipemerintah dengan cara yang dianggap berpengaruh oleh peneliti yaitu tata kelola pemerintahan, asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal, dan keadilan distributif.

Variabel bebas yang pertama dalam penelitian ini adalah tata kelola pemerintahan atau *good governance*. *Good governance* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mencapai suatu kesepakatan dalam menciptakan sebuah struktur dan dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang ada pada masing-masing instansi pemerintah, sehingga memiliki sistem yang dapat mengatur dalam melaksanakan tugasnya melaui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut (Amalia,2014).

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Baik buruknya pemerintah dinilai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsp-prinsip *good governance*. Adapun prinsip yang dikembangkan dalam tata kelola pemerintah yang baik menurut LAN dan BPKP (2000) adalah partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, keadilan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas dan visi strategis.

Penelitian mengenai tata kelola pemerintahan *(good governance)* yang dihubungkan dengan kecurangan dilakukan oleh ratnayani *et al* (2014) dan amalia (2015) dengan hasil bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kecurangan. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian wiliyanti (2013) dan Oktavia (2015) yang membuktikan bahwa tata kelola pemerintah tidak mempengaruhi tingkat kecurangan dilembaga pemerintah.

Variabel bebas yang kedua dalam penelitian ini adalah Asimetri Informasi. Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak pemegang amanah sebagai penyedia informasi/agent dengan pihak pemberi amanah sebagai pengguna informasi/principal (Scott, 2009:105).

Dalam instansi pemerintah, informasi yang diberikan harus seimbang antara pemberi amanah dengan pihak pemegang amanah, maka kecurangan semakin kecil. Sebaliknya jika informasi yang diberikan tidak seimbang antara pemberi amanah dengan pihak pemegang amanah, maka asimetri informasi semakin tinggi dan akan menjadi kesempatan bagi pegawai untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian Dhermawati Putri (2013) asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan. Berbeda dengan hasil penelitian Kusumastuti (2012) dan Made Dwi (2015) bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Variabel bebas yang ke tiga dalam penelitian ini adalah efektivitas pengendalian internal. Struktur pengendalian internal merupakan serangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses tersebut mencakup berbagai kebijakan dan prosedur sistematis, bervariasi dan memiliki tujuan utama untuk menjaga keandalan pelaporan keuangan entitas, menjaga efektif dan efisiensi operasi yang dijalankan, dan menjaga kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku (Shintadevi, 2015). Pengendalian internal yang lemah atau longgar dapat memberikan peluang seseorang untuk melakukan perilaku tidak etis yang merujuk pada terjadinya kecurangan yang dapat merugikan suatu instansi atau lembaga.

Penelitian mengenai pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan telah dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu, diantaranya dilakukan oleh Dhermawati

Putri (2013) dan Wiliyanti (2014) yang menemukan bahwa efektivitas pengendalian internal memberikan pengaruh terhadap kecurangan. Berbeda dengan hasil penelitian Kusumastuti (2012) bahwa Efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Variabel bebas yang terakhir dalam penelitian ini adalah keadilan distributif. Menurut Robbins (2008:249), keadilan distributif adalah keadilan tentang jumlah dan pemberian penghargaan diantara individu-individu. Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distributif keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi aspek-aspek fisik psikologis, ekonomi dan sosial.

Jika pegawai merasakan ketidakadilan dalam dirinya, akan membuat pegawai tersebut tidak puas bahkan tertekan. Jika hal tersebut terjadi, maka pegawai akan melakukan sesuatu agar dirinya puas, seperti dengan cara melakukan kecurangan. Penelitian yang dilakukan Pristyanti (2012) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh keadilan distributif terhadap kecurangan. Namun, hasil penelitian Yanita Maya (2015) menunjukkan sebaliknya, bahwa keadilan distributif berpengaruh terhadap kecurangan.

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan diatas, terjadi permasalahan kecurangan yang berdampak terjadinya korupsi. Dimana korupsi tersebut dilakukan oleh pejabat atau petugas yang secara tidak benar memanfaatkan jabatannya atau pekerjaannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain, dengan melanggar kewajiban dan hak orang lain.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Saftarini, Yuniarti, dan Sinarwati (2015) yang meneliti tentang pengaruh efektifitas pengendalian internal, asimetri informasi, dan implementasi *good governance* terhadap kecurangan *(fraud)*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen, waktu, serta lokasi penelitian. Penelitian ini menambah variabel keadilan distributif. Alasan penulis menambahkan variabel ini dalam penelitian adalah karena keadilan distributif merupakan keadilan yang berkaitan dengan distributif keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Di dalam suatu pemerintahan adanya suatu ketidakadilan yang dirasakan di dalam organisasi dapat menjadi pemicu seseorang unutk melakukan kecurangan.

TELAAH PUSTAKA

Kecurangan

Peraturan BPK-RI No. 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengatakan bahwa kecurangan adalah satu jenis tindakan melawan hukum yang disengaja untuk mendapatkan sesuatu dengan cara menipu.*Fraud* juga mengandung pengertian sebagai tipu daya dan cara-cara lain yang tidak sah yang akan merugikan korban/pihak yang ditipu. *Fraud* merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan adanya pencurian, penggelapan, penyalahgunaan kepercayaan maupun kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat intelektualitas dan kecerdasan yang tinggi (*white collar crime*).

Tata Kelola Pemerintahan

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan pinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta

penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009).

Indonesia merupakan salah satu negara yang berjuang dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau secara internasional disebut dengan *Good Governance (Good Corporate Governance* atau *GCG* untuk perusahaan dan *Good Governance* untuk lembaga publik atau pemerintahan), hal ini disambut baik bagi masyarakat baik dari kalangan pengusaha atau pejabat publik, harapan terhadap tata kelola pemerintahan yang sangat tinggi karena, akan dapat menekan terjadinya kecurangan, namun konsep tata kelola sepertinya belum menjadi semacam komitmen untuk dijalankan bersama dan konsisten disemua lini.

Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak pemegang amanah sebagai penyedia informasi/agent dengan pihak pemberi amanah sebagai pengguna informasi/principal (Scott, 2009:105).

Pendelegasian wewenang akan menyebabkan pemerintah daerah sebagai pengelola instansi akan lebih mengetahui prospek dan informasi instansi sehingga menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara pemerintah daerah dengan pihak legislatif yang disebut asimetri informasi. Bila terjadi asimetri informasi, pemerintah daerah akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan, dan lain-lain.

Efektivitas Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keadilan Distributif

Menurut Robbins (2008:249), keadilan distributif yaitu keadilan tentang jumlah dan pemberian penghargaan diantara Individu-Individu. Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distributif keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan Individu. Tujuan distributif ini adalah kesejahteraan sehingga yang didistribusikan biasanya berhubungan dengan sumber daya, ganjaran atau keuntungan.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Kecurangan

Good governance diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Maksud dari pemerintahan yang baik adalah pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang diamanatkan rakyat. Sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab. Dapat dilihat bahwa *Good Governance* merupakan peyelenggaraan pemerintah yang dicita-citakan oleh setiap negara.Penyelenggaraan *good governance* berlandaskan pada tiga prinsip dasar yaitu transparansi, akuntanbilitas dan partisipasi.

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* secara optimal maka diyakini akan dapat meminimalisir peluang terjadinya *fraud,* diharapkan

dapat menjadi solusi dan upaya mewujudkan dan membawa pemerintahan tersebut kedalam suatu pemerintahan yang baik dan bersih. Berdasarkan teori di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah :

H_1: Tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap kecurangan.

Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecurangan

Asimetri informasi merupakan kondisi dimana pihak dalam atau pengelola mengetahui informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar atau pihak pemakai informasi selain pengelola. Karena pihak dinas pemerintah merupakan pihak pengelola dana APBN yang sebagian besar berasal dari masyarakat. Jika kondisi tersebut terjadi, sehingga akan membuka peluang bagi pihak yang mengelola keuangan untuk melakukan kecurangan (Najahningrum et al., 2013).

Dengan demikian, semakin tinggi asimetri yang terjadi antara pihak pengelola dan pihak pengguna laporan keuangan, maka terjadinya tindak kecurangan (*fraud)* akan semakin tinggi. Berdasarkan teori di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H_2:Asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan.

Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecurangan

Tujuan dari pengendalian internal adalah agar kegiatan operasional pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai. Menurut Kusumastuti (2012) sistem pengendalian internal diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pimpinan. Pimpinan melakukan tindakan menyimpang untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

Jika pengendalian tidak berjalan dengan baik, prosedur tidak dilakukan maka akan membuka kesempatan bagi pegawai yang terlibat dalam kegiatan operasional organisasi untuk melakukan kecurangan.

Jadi semakin tinggi keefektifan pengendalian internal semakin kecil kecurangan. Berdasarkan teori di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah :

H_3: Efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan.

Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kecurangan

Keadilan distributif yaitu keadilan tentang jumlah dan pemberian penghargaan diantara individu-individu (Robbins dan Judge, 2008: 249). Keadilan yang berkaitan dengan distributif keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Tujuannya adalah kesejahteraan sehingga yang didistribusikan biasanya berhubungan dengan sumber daya, ganjaran atau keuntungan.

Di dalam suatu pemerintahan adanya suatu ketidakadilan yang dirasakan di dalam organisasi dapat menjadi pemicu seseorang ingin melakukan tindakan *fraud*. Jika seseorang memandang tukar menukar ini adil atau sebanding, mereka mungkin merasa puas. Jika mereka melihat bahwa terdapat ketidakadilan mengenai kompensasi yang seharusnya didapatkan maka akan mendorong mereka untuk melakukan kecurangan. Akan terjadi tekanan dalam dirinya berkaitan dengan ketidakadilan yang dipersepsikan sehingga mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan.Berdasarkan teori di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis keempat dari penelitian ini adalah :

H_4:Keadilan distributif berpengaruh terhadap kecurangan.

METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:115). Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Dumai yang berjumlah 34 OPD.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana teknik pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti bahwa yang menjadi sampel adalah pihak yang paling baik dijadikan sampel penelitian. Sampel yang diambil dari tiap-tiap untuk organisasi perangkat daerah adalah sebanyak 3 orang yaituKepala Bagian Keuangan, Bendaharawan, dan Staff Bagian Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Dumai.

Dengan kriteria yang dipilih adalah pejabat eselon IV di OPD (dinas, kantor dan badan) dan sudah menjabat minimal selama 1 tahun. Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel dalam penelitian ini di masing-masing OPD berjumlah 3 orang. Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 102 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Sumber data dari penelitian ini adalah kuesioner yang dibuat didasarkan dari penelitian terdahulu. Kuesioner akan dikirimkan kepada responden (kepala bagian keuangan, bendahara keuangan dan staff keuangan) disetiap OPD di kota Dumai.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kecurangan

Peraturan BPK-RI No. 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengatakan bahwa kecurangan adalah satu jenis tindakan melawan hukum yang disengaja untuk mendapatkan sesuatu dengan cara menipu. menurut Arens, *et al* (2011:371), kecurangan adalah setiap ketidak jujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang atau pihak lain. Istilah kecurangan dalam Tunggal (2012:189) diartikan sebagai penipuan di bidang keuangan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang maupun pihak lain.

Variabel kecurangan diukur dengan menggunakan instrumen ACFE dalam Yuliana (2016). Pernyataan ini diukur dengan menggunakan tiga indikator variabel, yaitu :

(1) Kecurangan Laporan Keuangan
(2) Penyalahgunaan Aset
(3) Korupsi

2. Tata Kelola Pemerintahan

Good governance adalah pemahaman atas konsep tata kelola yang baik oleh aparat pemerintah daerah. Dengan diterapkan dan dilaksanakannya good governance ini maka manajemen pemerintah akan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggungjawab dan pengawasannya, sehingga terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional transparan, akuntabel dan bebas dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Variabel tata kelola pemerintahan diukur dengan menggunakan instrumen LAN dan BPKP (2000). Pernyataan ini diukur dengan menggunakan sembilan indikator variabel, yaitu :

(1) Partisipasi
(2) Penegakan Hukum
(3) Transparansi
(4) Responsif
(5) Konsensus
(6) Equity

(7) Efektivitas dan Efisien
(8) Akuntabilitas
(9) Visi Strategi

3. Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Asimetri informasi ini membuat manajemen memanfaatkan ketidakselarasan informasi untuk keuntungan mereka serta sekaligus merugikan pihak luar organisasi, seperti membiaskan informasi yang terkait dengan pihak luar organisasi.

Variabel Asimetri Informasi diukur dengan menggunakan instrumen Dunk (1993) dalam (Wilopo, 2006). Pernyataan ini diukur dengan menggunakan enam indikator variabel, yaitu :

(1) Situasi dimana pihak intern instansi memiliki informasi yang lebih baik atas aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dibandingkan pihak luar instansi.jawabnya dibanding pihak luar instansi.
(2) Situasi dimana pihak intern instansi lebih mengenal hubunngan *input-ouput* dalam bagian yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
(3) Situasi dimana pihak intern instansi lebih mengetahui potensi kinerja yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
(4) Situasi dimana pihak intern instansi lebih mengenal teknis pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
(5) Situasi dimana pihak intern instansi lebih mengetahui pengaruh faktor eksternal dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
(6) Situasi dimana pihak intern instansi lebih mengerti apa yang dapat dicapai dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.

4. Keadilan Distributif

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian internal juga merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengukur, dan mengawasi sumber daya suatu organisasi untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dan untuk melindungi sumber daya organisasi tersebut.

Variabel efektivitas pengendalian internal diukur dengan menggunakan instrumen dari PP Nomor 60 Tahun 2008. Pernyataan ini diukur dengan menggunakan lima indikator variabel, yaitu :

1) Lingkungan pengendalian
2) Penilaian resiko
3) Kegiatan pengendalian
4) Informasi dan komunikasi
5) Pemantauan

5. Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan keadilan yang dipersepsikan mengenai perghargaan dan sumberdaya didistribusikan diseluruh organisasi (Ivancevich *et al*, 2006 dalam Najahningrum, 2013). Penghargaan dan sumberdaya tersebut berkaitan dengan penggajian didalam instansi pemerintahan.

Variabel keadilan ditributif diukur dengan menggunakan instrumen dari Aisah Fachrunissa (2015). Pernyataan ini diukur dengan menggunakan tiga indikator variabel, yaitu :

1) Kompensasi menggambarkan usaha yang dilakukan.
2) Kompensasi menggambarkan apayang diberikan kepada perusahaan.
3) Kompensasi sesuai dengan kinerja.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean)*,

standar deviasi, varian, maksimum, dan minimun (Ghozali, 2013:19). Varian dan standar deviasi menunjukkan penyimpangan data terhadap rata-ratanya *(mean*). Apabila standar deviasinya kecil, berarti nilai sampel atau populasinya mengelompok di sekitar rata-rata hitungnya.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Ghozali (2013:52-53) mendefinisikan uji validitas sebagai alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor konstruk. Jika korelasi antara masing-masing skor indikator terhadap total skor konstruk memiliki nilai signifikan maka dapat dikatakan bahwa setiap pertanyaan tersebut adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuosioner yang merupakan indikator variabel atau konstruk. Kehandalan berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur apabila dilihat dari stabilitas atau konsistensi internal dari jawaban atau pertanyaan jika pengamatan dilakukan secara berulang.

Kuesioner dikatakan andal (*reliable*) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji coba terhadap butir pertanyaan yang valid dilakukan untuk mengetahui keandalan butir pertanyaan tersebut dengan bantuan SPSS 21. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner adalah dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha (α).* Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *(α) > 0,60*(Ghozali, 2013:47-48).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013:160-165). Untuk memeriksa model regresi berdistribusi normal atau tidak dapat diperiksa melalui gambar *Normal P-P Plot of Regression Standarddized Residual.*

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah di dalam model regresi tersebut terdapat suatu penyimpangan, sehingga perlu diadakan pemeriksaan dengan menggunakan pengujian *multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi*.

Uji Multikoliniearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji *Multikolinieritas* dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Faktors*) dan nilai *tolerance*. Jika VIF > 10 dan nilai *tolerance* < 0,10 maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2013:105).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamataan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Metode regresi berganda merupakan metode statistik untuk menguji pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh simpulan dari penelitian ini, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis secara individual (parsial) dan secara menyeluruh (simultan). Uji Statistik *t* digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Untuk mencari t_{tabel} dengan df = N-2, taraf nyata 5% dapat dengan menggunakan tabel statistik (Ghozali, 2011).

Pengujian Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dapat dilihat dari koefisien determinasi. Koefisien determinasi ialah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasinya, semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013:105-127). Determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi, kemudian nilai tersebut dikalikan 100%. Rumus : Determinasi = R^2 X 100.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Kuesioner yang disebar sejumlah 102 kuesioner. Dari 102 kuesioner yang disebar, ada 15 kuesioner yang tidak kembali karena disebabkan oleh kesibukkan pejabat pemerintah daerah dan sebagian pejabat tidak berada ditempat sehingga tidak bisa mengisi kuesioner yang diberikan.

Hasil Statistik Deskriptif

Pengolahan data primer merupakan deskriptif penelitian berdasarkan pendapat responden mengenai pengaruh tata kelola pemerintahan, asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal dan keadilan distributif terhadap kecurangan pada instansi pemerintah di kota Dumai. Analisis deskriptif untuk tiap variabel dalam penelitian ini didasarkan pada jawaban setiap pernyataan dari responden dengan skala sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
TKP	87	27,0	45,0	35,621	3,9392
AI	87	18,0	30,0	24,287	3,7507
EPI	87	31,0	59,0	46,345	6,1433
KD	87	18,0	31,0	24,529	2,4392
KC	87	11,0	33,0	21,563	4,7366
Valid N(listwise)	87				

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % untuk uji 2 sisi, Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka alat ukur yang digunakan dinyatakan valid dan sebaliknya, jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka alat ukur yang digunakan tidak valid, nilai r_{tabel} dapat diperoleh dengan persamaan N-2. N merupakan jumlah responden dalam penelitian ini, sehingga 87-2=85 =0,211.

Hasil Uji Reliabelitas

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat dilihat, koefisien alpha untuk variabel Kecurangan (Y) sebesar 0.942, Tata Kelola Pemerintahan (X_1) sebesar 0.902, Aimetri Informasi (X_2) sebesar 0.958, Efektivitas Pengendalian Internal (X_3) sebesar 0.947 dan Keadilan Distributif (X_4) sebesar 0.851, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument penelitian adalah reliabel karena *Cronbath Alpha*≥ 0,6. Artinya bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau dapat dipercaya.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya telah berdistribusi secara normal atau tidak.

Gambar 1

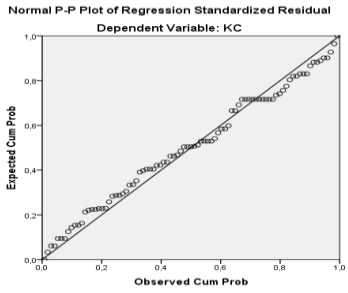

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa data penelitian berdistribusi secara normal.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain berbeda. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisis heteroskedastisidas dapat dilakukan dengan uji Glejser.Jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisidas.

Gambar 2

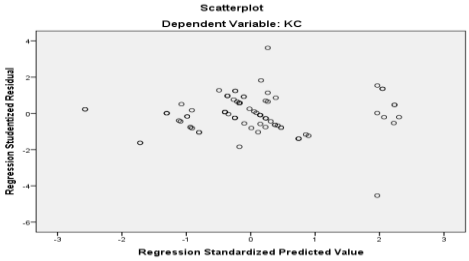

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antar variabel independen satu dengan variabel independen lainnya. Uji multikolinearitas dibuktikan dengan nilai variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika hasil pengujian menyatakan bahwa nilai VIF kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai VIF besar dari 10 dan nilai tolerance kecil dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2011).

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
Tata Kelola Pemerintahan (X_1)	0,323	3,094	Tidak terdapat Multikolinieritas
Asimetri	0,508	1,97	Tidak terdapat

Informasi (X_2)		0	Multikolinieritas
Efektivitas Pengendalian Internal (X_3)	0,352	2,843	Tidak terdapat Multikolinieritas
Keadilan Distributif (X4)	0,335	2,981	Tidak terdapat Multikolinieritas

a. Dependen Variable:Kecurangan *(Fraud)*

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda ini tidak hanya melihat berpengaruh signifikan atau tidak variabel independen terhadap vairabel dependen, tetapi juga dapat melihat arah dari pengaruh tersebut. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, perolehan persamaan regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel

Tabel 4
Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	62,151	2,373	
TKP	-.382	,100	-,371
AI	,225	,084	,178
EPI	-,346	,062	-,449
KD	-,670	,159	-,345

Sumber : *Data Olahan, 2018*

$Y= 62,151 -0,382X_1 + 0,225X_2 - 0,346X_3 - 0,670X_4 + e$

Hasil Pengujian Hipotesis
Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Kecurangan

Dari Tabel 4.16 diperoleh nilai t hitung sebesar 3,806 dengan signifikansi 0,000. Diketahui nilai t tabel (uji 2 sisi pada tingkat signifikansi 5%) yaitu 1,989. Dengan demikian maka t hitung (3,806) > t tabel (1,989) dan signifikansi (0,000) < 0,05. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa "Tata Kelola Pemerintahan berpengaruh terhadap pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai" diterima.

Penelitian mengenai tata kelola pemerintahan *(good governance)* yang dihubungkan dengan kecurangan dilakukan oleh Rizke Wiliyanti (2015) dan Muqty Randy (2016) dengan hasil bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kecurangan. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian Karlina Gita (2015) yang membuktikan bahwa tata kelola pemerintah tidak mempengaruhi tingkat kecurangan dilembaga pemerintah.

Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecurangan

Dari Tabel 4.17, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,682 dengan signifikansi 0,009. Diketahui nilai t tabel (uji 2 sisi pada tingkat signifikansi 5%) yaitu 1,989. Dengan demikian maka t hitung (2,682) > t tabel (1,989) dan signifikansi (0,009) < 0,05. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa "Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Kecurangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai" diterima.

Hasil penelitian Dhermawati Putri (2013) asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan. Berbeda dengan hasil penelitian Made Dwi Setiawan (2015) bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Pengaruh Efektivitas Pengedalian Internal terhadap Kecurangan

Dari tabel 4.18, diperoleh nilai t hitung sebesar 5,615 dengan signifikansi 0,000. Diketahui nilai t tabel (uji 2 sisi pada tingkat signifikansi 5%) yaitu 1,989 Dengan demikian maka t hitung (5,615) > t tabel (1,989) dan signifikansi (0,000) < 0,05. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa "Efektivitas Pengedalian Internal berpengaruh terhadap KecuranganpadaOrganisasi

Perangkat Daerah Kota Dumai" diterima.

Penelitian mengenai pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan telah dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu, diantaranya dilakukan oleh Rizke Wiliyanti (2014) dan Dhermawati Putri (2013) yang menemukan bahwa efektivitas pengendalian internal memberikan pengaruh terhadap kecurangan. Berbeda dengan hasil penelitian Kusumastuti (2012) bahwa efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kecurangan

Dari Tabel 4.19, diperoleh nilai thitung sebesar 4,217 dengan signifikansi 0,000. Diketahui nilai t tabel (uji 2 sisi pada tingkat signifikansi 5%) yaitu 1,989. Dengan demikian maka t hitung (4,217) > t tabel (1,989) dan signifikansi (0,000) < 0,05. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa "Keadilan Distributif berpengaruh terhadap kecurangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai" diterima.

Penelitian yang dilakukan Pristyanti (2012) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh keadilan distributif terhadap kecurangan. Namun, hasil penelitian Yanita Maya (2015) menunjukkan sebaliknya, bahwa keadilan distributif berpengaruh terhadap kecurangan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah untuk melihat persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5
Hasil UjiKoefisien Determinasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,903[a]	0,816	,807	2,0816

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Dari tabel diatas diperoleh nilai R^2sebesar 0,816. Artinya adalah bahwa persentase Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal dan Keadilan Distributif pada OPD Kota dumai sebesar 81,6%. Sedangkan sisanya sebesar 12,4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti komitmen organisasi, budaya etis organisasi, penegakan hukum dan peran auditor internal.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwatata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap kecurangan *(fraud)*.Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizke Wiliyanti (2014) yang menemukan hasil bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap Kecurangan *(fraud)*. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karlina Gita (2015) yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kecurangan *(fraud)*.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan asimetri informasiberpengaruh terhadap kecurangan *(fraud)*.Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhermawati Putri (2013) yang menemukan hasil bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan *(fraud)*. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Dwi Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa

Asimetri Informasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan *(fraud)*.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan *(fraud)*. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizke Wiliyanti (2014) yang menemukan hasil bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan *(fraud)*.Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh kusumastuti (2012) yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan *(fraud)*.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh terhadap kecurangan *(fraud)*.Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanita Maya (2015) yang menemukan hasil bahwa keadilan distributif berpengaruh terhadap kecurangan *(fraud)*.Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012) yang menyatakan bahwa keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kecurangan *(fraud)*.

Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari masing-masing Responden.
2. Penelitian ini hanya menggunakan empat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu Tata Kelola Pemerintahan, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal dan Keadilan Distributif.

Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu:

1. Tata Kelola Pemerintahan, Asimetri informasi, Efektivitas pengendalian internal, dan keadilan distributif terhadap kecurangan pada OPD Kota Dumai. Hasil ini dapat menjadi acuan bagi OPD untuk mengevaluasi kinerja pegawai OPD Kota Dumai dalam rangka meminimalisir dan mencegah terjadinya Kecurangan pada pemerintah Kota Dumai.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti metode wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang lebih berkualitas.
3. Untuk penelitian selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup sampel sehingga mungkin saja hasilnya berbeda.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecuranganberdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Association of Certified Fraud Examiner, *Fraud Examiner Manual*. Printed in USA by the Associate of Certified Fraud Examiner Inc, The Greg or Building 716. West A Venue Austin Texas 2005 and 2006.

Ghozali, Imam, 2013. *Aplikasi Analisis Mutivariate Dengan Program IBM SPSS 21 (edisi keenam)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang.

Indonesia Corruption Watch. 2014. Annual Report 2014. http://www.antikorupsi.org/id/doc/annual-report-2014.

Kurniawan, A , 2014. *Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional*. Yogyakarta: BPFE.

Kusumastuti, Nur Ratri, 2012. *Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis sebagai variabel intervening*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Penerbit Andi : Yogyakarta

Mustikasari, Dhermawati Putri. 2013. Persepsi Pegawai Dinas Se-Kabupaten BatangTentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud). Accounting Analysis Journal AAJ 2 (3) (2013).

Najahningrum, Anik Fatun, Sukardi Ikhsan, dan Maylia Pramono Sari. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*. Simposium Nasional Akuntansi XVI Menado.

Pristiyanti, Ika Ruly.2012."Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan."Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES.

Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bandung. PT. Refika Aditama.

Shintadevi, Prekanida F arizqa. 2015. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening Pada Universitas Negeri Yogyakarta.* Skripsi. FE UNY : Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tuanakotta, Theodorus. 2007. *Akuntansi Forensik and Audit Investigatif.* Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta

Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta

Wiliyanti, Rizke. 2014. *Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektifitas Pengendalian Internal, Peran Auditor Internal Terhadap Tingkat Kecurangan:* Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Riau.

Wilopo. 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9 Padang STIE Perbanas. Surabaya.

http://infokorupsi.com.Kasus-Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Pemerintahan Kota Dumai

http://www.transparency.org

www.dumaikota.go.id